

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etnisitas

Ras maupun etnik merupakan kenyataan sosial yang penting karena orang menilai penting akan keberadaan kelompok yang dianggap sebagai rasnya. Tetapi ras adalah konsep yang membingungkan karena tidak ada kesepakatan umum mengenai istilah tersebut (Horton & Hunt, 1992: 60). Oleh karena itu dapat difahami ketika Weber melihat etnisitas sebagai suatu identitas, kesadaran, afiliasi dan komitmen pada suatu aksi yang sangat beragam, sesuai dengan pengalaman historis dari kategori etnis yang spesifik dan batas-batas politik dimana hal itu terjadi (Krishnan, 1995: 34). Dalam kaitan ini Koentjaraningrat (1983) mengusulkan istilah kelompok etnik diganti dengan istilah golongan etnik atau suku bangsa (Kamanto, 1993: 137)

Salah satu definisi menyebut ras sebagai suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, di samping itu banyak juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Lazimnya umat manusia dibagi kedalam tiga kelompok ras utama: Mongoloid (kuning dan coklat), Negroid (hitam) dan Kaukasoid (putih). Tetapi klasifikasi beberapa kelompok tidaklah tegas karena ciri-ciri fisik mereka tumpang tindih sebagai akibat adanya kenyataan bahwa beberapa kelompok ras telah saling kawin maupun sejak

ribuan tahun yang lalu, sehingga hampir semua kelompok ras telah saling bercampur baur.

Para ahli sosiologi lalu menggunakan istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok -baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras- yang secara sosial dianggap telah berada dan mengembangkan subkulturnya sendiri. Walaupun perbedaan kelompok dikaitkan dengan nenek moyang tertentu, namun ciri-ciri pengenalnya dapat berupa bahasa, agama, wilayah kediaman, kebangsaan, bentuk fisik, atau gabungan dari beberapa ciri tersebut (Horton & Hunt, 1992: 60-1).

Semua kelompok ras kurang lebih sama dalam karakteristik fisik yang penting, perbedaan fisik yang ada hanyalah bersifat kosmetik dan tidak fungsional bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Faktor kebudayaanlah yang paling banyak berpengaruh terhadap lahirnya perbedaan di kalangan kelompok etnik, bukannya faktor keturunan.

Keberadaan kelompok etnik tidak selamanya permanen dan seringkali hilang karena adanya asimilasi atau amalgamasi. Asimilasi berarti perbauran budaya dimana dua kelompok melebur kebudayaan mereka sehingga melahirkan satu kebudayaan. Biasanya terjadi pertukaran unsur-unsur budaya dan umumnya terjadi jika suatu kelompok menyerap kebudayaan lainnya. Amerikanisasi berarti kelompok imigran memberikan beberapa unsur budaya mereka tetapi lebih banyak menyerap inti budaya yang bersumber dari Inggris. Amerikanisasi nama-

... dan budaya Inggris (Inggris) merupakan salah satu

(*outsiders*) atau menjadi anggota (*members*). Konflik tidak terelakkan bila suatu daerah dihuni oleh lebih dari satu etnis, dan nepotisme menjadi-jadi bila bila suatu kelompok menyadari identitas mereka dan merasa perlu melindunginya.

Identitas etnis memiliki aspek obyektif dan subyektif. Aspek obyektif adalah bahasa, agama, ras, kedaerahan dan budaya. Aspek subyektif adalah bahwa kelima hal itu ditafsirkan secara subyektif oleh masing-masing pihak. *Bahasa*: tidak semua pemakai bahasa yang sama merasa satu etnis (misal: antara Bosnia muslim, Kroatia dan Serbia; antara suku Hutu dan Tutsi). *Agama*: tidak semua mereka yang satu agama merasa satu etnis (misal: antara muslim India, Pakistan dan Banglades; antara muslim Kurdi dengan muslim Iraq, Iran, Suriah dan Turki). *Kedaerahan*: tanpa berasal dari satu kawasanpun orang bisa merasa satu etnis (misal: Yahudi sebelum Israel-1948; orang-orang Gipsi di Eropa Tengah dan Timur). *Ras*: warna kulit sering merupakan konstruk sosial, tidak biologis (kulit berwarna di Afrika Selatan sama dengan kulit hitam di Amerika Serikat). *Budaya*: walau sama berbahasa Inggris, budaya kelas atas dan budaya kelas bawah sangat berbeda di Inggris, khususnya dalam hal cara makan, musik, sport, percakapan, pakaian.

Perbedaan etnis tidak selalu berarti konflik terbuka. Banyak etnis di suatu tempat yang tidak merasa terancam secara sosial politik, mereka bisa bekerja sama sesuai aturan. Tetapi di tempat lain perbedaan etnis bisa berarti suka di atas, menaruh kekerasan, mencintakan instabilitas

yang luas dan bahkan menghancurkan kehidupan. Dalam hal konflik etnis, meski banyak yang muncul secara spontan, banyak juga yang butuh rekayasa politik, penggerak, jaringan organisasi, diskursus (perangkat prinsip-prinsip dan ide-ide) untuk mengaktifkannya (Yusuf Bangura, 1995).

Di Indonesia etnisitas biasanya dihubungkan dengan suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara dan berkaitan dengan pembagian hukum adat (Singarimbun, 1992: 56).

Pada sebagian negara yang mejemuk etnisitas menunjukkan gejala separatisme yang berakar pada perasaan primordial suku bangsa sehingga kurang menyumbang pada nasionalisme kebangsaan. Hal ini nampak dalam kurang efektifnya interaksi antar suku bangsa. Interaksi antar suku bangsa menjadi sulit karena perbedaan budaya dijadikan indikasi untuk membedakan efektivitas interaksi di dalam suku bangsa (*in group*) dengan kelompok luar (*out group*) yang ditandai dengan menguatnya solidaritas *in group* dan melemahnya solidaritas *out group* (Eriksen, 1993: 12).

Kesetiaan pada etnis juga tumbuh di daerah/kota lain di luar daerah asal. Ini disebut *urbanism ethnic*. Di daerah perantauan, orang yang berasal dari daerah atau etnis yang sama memperlihatkan kecenderungan masih mempunyai kesetiaan kepada etnis atau daerah asalnya (Sudagung

Implikasi politik dari persamaan dan perbedaan etnik dari warga suatu negara tidak dapat diabaikan. Baik pada saat etnik ini diakui secara resmi maupun pada saat dianggap tidak ada, jaringan kerjasama etnik terpelihara dan berfungsi secara informal. Jaringan kerjasama etnik ini akan timbul ke permukaan jika otoritas negara yang bersifat supra etnik menjadi melemah yang mengharuskan warga etnik itu berjuang sendiri memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mereka (Amal dan Armawi, 1996: 140). Bahkan sejak 1970-an, di dorong oleh berbagai kekecewaan berlarut dalam negara nasionalnya masing-masing, telah muncul gerakan-gerakan etnik yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik, minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, maksimal mendirikan negara etnik tersendiri (Kontjaraningrat, 1993: 1-2). Bahkan Alvin Toffler meramalkan bahwa masalah etnik ini akan berlanjut terus sampai abad ke-21 (Toffler, 1990: 249-250).

Menurut Donald I. Noel (1968) stratifikasi etnik muncul bila terpenuhi tiga persyaratan: etnosentrisme, persaingan dan perbedaan kekuasaan. Etnosentrisme menurut Sumner (1940) adalah suatu sudut pandang yang menempatkan kelompok sendiri di atas segala-galanya dan menilai kelompok lain dengan memakai kelompok sendiri sebagai acuan. Stratifikasi etnik tidak terjadi bila hanya salah satu atau dua prasyarat yang terpenuhi. Etnosentrisme saja, misalnya, tidak menyebabkan stratifikasi etnik bila antara kedua kelompok yang berinteraksi terdapat kesamaan dan saling ketergantungan. Etnosentrisme

dan persaingan tanpa disertai perbedaan kekuasaan, menurut Noel, hanya akan melahirkan persaingan berkepanjangan tanpa penyelesaian. Kontak antara kelompok kulit hitam dengan kelompok kulit putih berkembang menjadi hubungan perbudakan dimungkinkan karena adanya etnosentrisme di pihak kelompok kulit putih, adanya persaingan di bidang ekonomi, dan adanya kekuasaan lebih besar di pihak kelompok kulit putih (Kamanto, 1993: 139).

B Lembaga Agama dan Pola Pembinaan Komunitas Beragama

Dalam perkembangan masyarakat dimana para ahli agama juga selalu tampil maka akan muncul pula suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah mengelola masalah keagamaan. Organisasi keagamaan yang khusus ini pada umumnya dijumpai dalam masyarakat dimana fungsi diferensiasi internal dan stratifikasi yang ditimbulkan oleh perkembangan agama telah berkembang. Dengan demikian kehadiran organisasi keagamaan yang khusus menunjukkan salah satu aspek dari semakin meningkatnya pembagian kerja dan spesifikasi fungsi yang merupakan atribut penting masyarakat perkotaan (O'Dea, 1987: 69).

Secara lebih rinci, Thomas F. O'Dea menulis bahwa ada dua hal yang cenderung memacu perubahan diri suatu agama 'primitif' ke arah agama yang terorganisasi secara khusus: *pertama*, meningkatnya kedalaman beragama (*inner differentiation*). Karena pembagian kerja dalam

alokasi fasilitas serta sistem imbal jasa yang kian ruwet, maka masyarakat cenderung mengembangkan suatu tingkat spesifikasi fungsi yang lebih tinggi. Kemudian tampillah kelompok-kelompok dengan tujuan yang lebih jelas dan terperinci untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti produksi, pendidikan dan sejenisnya, yang sebelumnya ditangani oleh kelompok-kelompok yang lebih kabur, seperti keluarga. Agama yang terorganisasi secara khusus ini lahir sebagai akibat dari kecenderungan umum ke arah pengkhususan fungsional.

Kedua, meningkatnya pengalaman keagamaan yang mengambil bentuk dalam corak organisasi keagamaan baru. Dalam studinya tentang konversi agama A.D. Nock menunjukkan bahwa kelompok keagamaan yang baru seringkali berbenturan dengan berbagai norma dan lembaga masyarakat yang telah mapan. Organisasi baru mengetengahkan komunitas baru dan pola hidup baru pada para anggotanya. Ia juga memutuskan hubungan dengan masa lalu. Ritus, keyakinan dan corak organisasi keagamaan yang baru akan berbeda dari masing-masing kelompok keagamaan yang ada dalam masyarakat (O' dea, 1987:90-1).

Pada kenyataannya, berbagai organisasi keagamaan itulah yang sekarang ini banyak melakukan pembinaan terhadap kehidupan umat bergama. Hasil dari pembinaan ini, menurut Burhanuddin Daya, antara lain adalah munculnya dua sikap pemeluk agama: *pertama, healthy* yaitu mereka yang menganut agama dengan segala ketenangan, pandangan luas objektif dan menghargai orang lain. Dengan kata lain, kelompok ini

dapat disebut dengan kelompok yang mencintai kerukunan dan kedamaian antar agama. *Kedua, suffering* yaitu mereka yang menganut agama dengan sikap tertutup. Kelompok ini menganggap diri paling benar dan yang lain salah. Sikap pemeluk agama yang kedua ini sering menebarkan konflik dan suka memaksakan agama dan kehendak kepada kelompok lain.

Pendidikan dan pembinaan agama yang diberikan lembaga agama atau pemimpin agama terhadap umatnya sangat mempengaruhi munculnya sikap para pemeluk agama. Pola pembinaan yang cenderung eksklusif dan berwawasan sempit akan menghasilkan umat beragama yang berwawasan sempit pula. Demikian pula sebaliknya (GATRA, Februari 1977).

C. Migrasi

Migrasi bisa terjadi secara spontan maupun diatur pemerintah. Migrasi spontan sudah dilakukan beberapa kelompok etnis tertentu seperti orang Bawean, Bugis, Banjar dan Minangkabau. Migrasi yang diatur pemerintah terlihat pada program transmigrasi (Aswatini Raharto, 2004).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok: pendorong, penarik dan sarana. Pendorong berkaitan dengan adanya kondisi buruk di tanah kelahiran yang memaksa orang meninggalkannya. Penarik adalah adanya menarik di negeri yang

didatangi seperti kesempatan ekonomi, cuaca, dan tipe pemerintahan. Sarana berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dan ada atau tidaknya hambatan untuk mengadakan perpindahan tersebut. Dalam hal ini transportasi selalu merupakan hambatan yang sulit. Sedangkan hambatan hukum seperti larangan emigrasi dan pembatasan imigrasi tidak terlalu sulit diatasi (Horton & Hunt, 1984: 103-4)

Mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi, utamanya terjadi pada periode tahun 1980-1990 (7,85 persen per tahun). Tingkat pertumbuhan penduduk kota turun tajam menjadi 2,01 pada periode 1990-2000, tetapi dilihat persentase penduduk yang tinggal di kota tampak semakin meningkat dengan pesat. Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, persentase penduduk kota di Indonesia pada tahun 1980 hanya sebesar 22,38 persen, angka tersebut telah meningkat menjadi 35,91 persen pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian (2000), persentase penduduk kota di Indonesia telah mencapai sebesar 42,43 (BPS, 1982, 1992 dan 2001). (Haning Romdiati dan Mita Noveria, 2004).

Pola migrasi spontan lebih banyak dilakukan secara ilegal, dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang berangkat dengan cara ini diperkirakan jauh lebih besar, karena prosedur yang diatur pemerintah

Migrasi tenaga kerja yang dilakukan secara spontan dan ilegal maupun yang melalui prosedur resmi pemerintah melibatkan beberapa lapis perantara dan ini seringkali membuka celah-celah untuk eksploitasi tenaga kerja sejak mereka masih di daerah asal sampai mereka bekerja di daerah tujuan, seperti terungkap dalam studi empirik baik di daerah asal maupun daerah transit migran (Aswatini Raharto, 2004).

D. Integrasi Sosial

Integrasi sosial lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan-kedekatan hubungan sosial, ekonomi dan politik (Usman, 1996: 79). Dengan kalimat yang lain integrasi juga didefinisikan sebagai proses atau potensialitas yang mendorong ke arah proses dimana komponen-komponen dua kelompok sosial atau lebih menjadi terpadu sehingga memberikan kebersamaan dan kesatuan antara kelompok-kelompok yang ada. Dengan pengertian ini tercakup di dalamnya *kasus integrasi* dan *potensialitas integrasi* (Mudzhar, 1998: 129).

Masyarakat bisa terintegrasi bila: *pertama*, individu yang menjadi anggota masyarakat mengalami rasa memiliki sebagai suatu kelompok sosial atau kolektivitas berdasarkan antara lain atas norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yang disepakati bersama. *Kedua*, aktivitas maupun fungsi dari institusi atau subsistem di dalam suatu masyarakat

lebih saling melengkapi daripada saling berlawanan satu dengan lainnya. *Ketiga*, adanya lembaga tertentu yang menganjurkan untuk saling mengisi/mengimbangi dan mengkoordinir aktivitas dari berbagai subsistem dari masyarakat itu sendiri (Jary, 1991: 315).

Sedangkan menurut Sunyoto Usman, masyarakat terintegrasi karena: *pertama*, adanya kesepakatan sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. Integrasi semacam ini lebih sering tercipta dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (*poly-communal*) yaitu masyarakat yang ditandai oleh segmentasi berbagai macam kelompok sosial dengan sub kebudayaan sendiri yang unik. Masyarakat seperti ini juga ditandai oleh tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan struktur sosial yang terbelah ke dalam institusi-institusi yang tidak bersifat komplementer. Kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental sangat krusial karena mampu meredam kemungkinan berkembangnya konflik-konflik ideologi akibat dari kebencian atau antipati antar kelompok

Kedua, adanya kenyataan bahwa sebagian besar anggota masyarakat terhimpun dalam berbagai unit-unit sosial sekaligus (*cross-cutting affiliations*). Dengan mekanisme ini konflik yang terjadi (baik yang nampak/kasus konflik maupun yang laten/potensialitas konflik) teredam oleh loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*). *Cross-cutting affiliation* memungkinkan elemen-elemen sosial yang saling bertentangan tetap dinestabikan dalam suatu posisi yang relatif seimbang. Kelompok-

kelompok sosial yang ada menjadi saling mengawasi aspek-aspek sosial yang potensial menciptakan permusuhan.

Ketiga, adanya saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perbedaan pemilikan dan penguasaan sumber daya ekonomi memang mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok pendapatan (kaya, menengah, miskin). Model pembangunan saling ketergantungan ekonomi dapat mencegah tumbuhnya eksploitasi antar kelompok dan spesialisasi yang terjadi bersifat fungsional sehingga ciri-ciri diferensiasi tidak terlalu sukar diseimbangkan (Usman, 1996: 80-1).

Integrasi sosial juga berarti solidaritas sosial yang sama-sama dibentuk oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok. Solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau antara kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional mereka. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional (Johnson, 1986: 181).

Basis solidaritas sosial berbeda antara masyarakat sederhana dengan masyarakat yang lebih kompleks. Dalam masyarakat sederhana solidaritas berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan, langsung, dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Dalam hubungan non-kekeluargaan, dalam masyarakat yang lebih kompleks, dasar-dasar

... ..

Emile Durkheim (1893) membagi dua tipe solidaritas sosial: solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis didasarkan pada kesamaan antar individu. Tipe ini dominan dalam masyarakat yang sederhana dan belum maju. Sedangkan solidaritas organis didasarkan pada pembagian kerja dan saling melengkapi antar individu. Tipe ini idealnya terjadi dalam masyarakat modern yang sudah maju (Jary, 1991: 389). Durkheim lebih lanjut menjelaskan bahwa solidaritas mekanis didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness/conscience*) yaitu "totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-sarat ada pada warga masyarakat bersama itu." Karena itu, dalam masyarakat yang solidaritasnya mekanis, individualitas tidak berkembang karena dia terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (Johnson, 1986: 183).

Durkheim juga membagi integrasi sosial atas dua hal: pertama, integrasi normatif, yang ada dalam perspektif budaya dan menekankan solidaritas mekanik yang terbentuk melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Kedua, integrasi fungsional yang menekankan pada solidaritas organik, suatu solidaritas yang terbentuk melalui relasi saling tergantung antara bagian atau unsur dalam masyarakat (Shills, 1972: 382).

Sosiolog lainnya, Cooley, membagi integrasi sosial ke dalam tiga bentuk: pertama, integrasi normatif yang merupakan tradisi baku

mengikatkan diri dalam kebersamaan itu. *Kedua*, integrasi komunikatif. Komunikasi dalam hal ini hanya dapat dibangun bagi mereka yang memiliki sifat saling tergantung dan mau diajak bekerjasama menuju tujuan yang dikehendaki. *Ketiga*, integrasi fungsional yang hanya akan terwujud bila anggota yang mau mengikatkan diri menyadari fungsi dan peran mereka dalam kebersamaan (Shills, 1972: 381).

Dalam penelitiannya tentang masyarakat kompleks perumahan industri dan penduduk asli di desa sekitarnya, Ravik Karsidi (1988) menulis bahwa integrasi hanya terjadi bila dipenuhi syarat-syarat: *pertama*, anggota masyarakat merasa tidak dirugikan bahkan keuntungan akan diperoleh lebih besar. *Kedua*, adanya persesuaian faham tentang norma dalam arti bagaimana harus bertingkah laku untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. *Ketiga*, norma yang berlaku harus konsisten agar terbentuk suatu struktur yang jelas.

Secara bertahap integrasi sosial akan berlangsung melalui proses: *pertama*, akomodasi. Ini merupakan upaya pihak-pihak yang berbeda pendapat atau bertentangan untuk mencari pemecahan masalah. *Kedua*, koordinasi. Merupakan upaya menyelesaikan perbedaan dengan mewujudkan suatu bentuk kerjasama. *Ketiga*, asimilasi atau akulturasi yang merupakan kontak budaya yang berlainan atau pertemuan dua

E. Hipotesa Penelitian

Sebagaimana disebutkan di atas, *research questions* penelitian ini adalah mengapa *integrasi sosial berjalan baik antara masyarakat Sulit Sir dengan masyarakat tempat mereka tinggal di Yogyakarta.*

Setelah membaca berbagai teori terkait sebagaimana ditulis di atas maka, maka peneliti menulis hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut

- a. Ada hubungan antara kualitas integrasi dengan etnisitas. Kualitas integrasi lebih tinggi pada mereka yang memiliki tingkat etnisitas rendah dibanding dengan mereka yang memiliki tingkat etnisitas tinggi.
- b. Ada hubungan antara kualitas integrasi dengan religiusitas.

Semakin tinggi tingkat religiusitas semakin tinggi kualitas integrasi